

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian di Indonesia memegang peranan penting dari keseluruhan jenis perekonomian nasional. Hal ini terjadi karena Indonesia mempunyai struktur sistem perekonomian agraris, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani dan penghasilannya berasal dari proses bertani. Sasaran utama pembangunan pertanian adalah peningkatan produksi pertanian pendapatan petani, melalui kegiatan disektor pertanian diusahakan dapat berjalan lancar dengan peningkatan produksi pangan baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pertanian yang diharapkan memperbaiki taraf hidup petani, memperluas lapangan pekerjaan bagi golongan masyarakat yang tergantung pada sektor pertanian. Pembangunan pertanian di arahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna meningkatkan kebutuhan pangan, kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha (Soekartawi, 2002)

Kenaikan dan penurunan produksi dapat terjadi karena perubahan penggunaan faktor - faktor produksi. Produk-produk pertanian dihasilkan dari kombinasi faktor produksi lahan, tenaga kerja, modal (pupuk, benih, dan obat-obatan). Dalam usahatani teknologi penggunaan faktor-faktor produksi memegang peranan yang sangat penting, karena kurang tepatnya penggunaan jumlah dan kombinasi faktor produksi mengakibatkan rendahnya produksi yang dihasilkan atau tingginya biaya produksi. Rendahnya produksi dan tingginya biaya produksi akan mengakibatkan rendahnya pendapatan petani. Karena keterbatasan pengetahuan petani dalam konsep-konsep usahatani, masih banyak petani yang belum memahami bagaimana faktor produksi digunakan secara efisien (Soekartawi, 2003).

Negara Indoneia, salah satunya Provinsi Jambi keberadaan lahan sawah memberikan peranan yang sangat penting terutama dalam penyediaan kebutuhan permintaan hasil pangan. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu Kabupaten penghasil padi kedua terbesar setelah Kabupaten Kerinci, oleh sebab

itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dianggap sebagai salah satu lumbung penghasil beras bagi Provinsi Jambi. Kondisi ini di lihat pada luas panen, produksi, dan produktivitas padi sawah di Provinsi Jambi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020

Kabupaten	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
Kerinci	20.644	102.493	4.964
Merangin	7.903	678.127	48,39
Sarolangun	6.159	4.223	50,21
Batanghari	6.159	20.063	3.257
Muaro Jambi	6.594	22.653	3.435
Tanjung Jabung Timur	12.985	58.296	4.489
Tanjung Jabung Barat	7.628	31.796	4.168
Tebo	5.714	23.822	4.169
Bungo	5.45	20.265	3.718
Kota Jambi	605	2.213	3.657
Sungai Penuh	7.278	40.675	5.588

Sumber: BPS Provinsi Jambi. Jambi dalam angka 2020

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa terdapat dua kabupaten sentra penghasil padi sawah yaitu Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun luas panen, produksi, dan produktivitas padi sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2016	37.736	193.491	51,27
2017	36.647	187.689	54,12
2018	20.393	36.000	73,11
2019	8.015	34.358	42,87
2020	12.985	58.296	44,89

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2020

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa luas panen dan produksi padi sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfluktuasi pada periode 2016 hingga 2020. Berdasarkan tabel 2 tersebut diketahui bahwa telah terjadi penurunan luas lahan dan produksi yang signifikan dari tahun 2017 ke tahun 2018, dimana luas panen pada 2017 adalah 36.647 Ha turun menjadi 20.393 Ha pada tahun 2018 dan untuk produksinya turun dari 187.689-ton menjadi 36.000 ton.

Penurunan luas panen dapat terjadi karena adanya penurunan luas tanam, serangan hama, gagal panen, atau bencana alam yang juga mengakibatkan penurunan produksi. Berdasarkan tabel 2 juga diketahui bahwa produktivitas padi sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami fluktuasi yang cenderung menurun, hanya terjadi peningkatan pada tahun 2015. Penurunan ini menjadi salah satu indikator kinerja usahatani padi sawah yang kurang baik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh petani padi sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terutama dalam penggunaan faktor produksi seperti penggunaan luas lahan, benih, pupuk dan pestisida.

Tabel 3. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah di Kecamatan Dendang Tahun 2016-2020

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (ton/Ha)
2016	3.726,0	12.324,00	3,30
2017	3.745,5	15.620,00	4,17
2018	4.199,5	17.931,86	4,27
2019	4.745,5	20.500,56	4,32
2020	2.068,4	9.038,908	4,37

Sumber: Dinas pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2020

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa luas panen padi sawah di Kecamatan Dendang dari tahun 2016 – 2020 cenderung berfluktuasi. Luas panen padi sawah pada tahun 2020 menurun sebesar 2.677,1 Ha dengan produksi 9.038,908 Ton. Produktivitas padi sawah di Kecamatan Dendang pada tahun 2020 meningkat yaitu sebesar 0,05 Ton/Ha. Hal tersebut membuktikan bahwa salah satu penggunaan faktor produksi yaitu penggunaan pupuk subsidi pada tanaman padi sawah di Kecamatan Dendang sangat berpengaruh terhadap produktivitas, namun tidak berpengaruh terhadap kenaikan luas panen.

Program intensifikasi pertanian yang dicanangkan oleh pemerintah diharapkan mampu menjaga tingkat produksi padi agar kebutuhan beras baik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun di Provinsi Jambi dapat terjamin. Salah satu program intensifikasi yang dicanangkan oleh pemerintah adalah penggunaan pupuk pada tanaman untuk meningkatkan produksi tanaman tersebut. Padi sawah merupakan salah satu tanaman yang membutuhkan unsur hara yang lengkap agar menghasilkan produksi yang optimal. Menurut Syafa'at (2007), pupuk yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan unsur hara pada padi sawah yaitu pupuk urea, pupuk ZA, pupuk NPK, pupuk TSP atau SP-36, dan pupuk organik.

Pupuk merupakan sarana produksi yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan produksi dan produktivitas bahan pangan dan merupakan salah satu komponen biaya produksi terbesar dalam kegiatan usahatani padi. Oleh sebab itu ketersediaan pupuk dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau, waktu dan jenis yang tepat serta kualitas yang terjamin perlu dapat dipastikan agar produksi dan produktivitas dapat terus ditingkatkan.

Program intensifikasi ini memiliki beberapa permasalahan, salah satunya adalah mahalnya harga input terutama pupuk. Menurut Peraturan Menteri Pertanian No 1 Tahun 2020, harga pupuk urea non subsidi Rp 250.000/50kg, harga pupuk SP36 sebesar Rp250.000/50kg, harga pupuk NPK non subsidi sebesar Rp 450.000/50kg, dan harga pupuk ZA sebesar Rp160.000/50kg. Peningkatan produksi padi melalui intensifikasi membutuhkan upaya pemerintah untuk menyediakan input terutama pupuk dengan harga yang terjangkau dan dekat dengan petani.

Sukirno (2006) menyatakan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan ekonomi yang bertumpu pada upaya untuk meningkatkan produktivitas guna menyelesaikan persoalan tersebut. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan subsidi pupuk. Menurut Lumintang (2013), dengan adanya kebijakan subsidi pupuk maka produktivitas petani dapat dimaksimalkan. Hal ini sejalan dengan Susila (2010) yang menyatakan bahwa pemberian subsidi pupuk berdampak positif terhadap peningkatan modal petani, pengembangan pasar pupuk, adopsi teknologi, peningkatan produktivitas petani, dan perbaikan pendapatan usahatani.

Kebijakan subsidi pupuk di Indonesia saat ini masih dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/ PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pupuk bersubsidi menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Menurut peraturan ini juga ditentukan jenis pupuk bersubsidi yaitu pupuk anorganik (urea, SP36, ZA, NPK) dan pupuk organik. Tujuan utama subsidi pupuk seperti yang dikutip dari Handoko dan Patriadi (2005) adalah agar harga pupuk ditingkat petani dapat tetap terjangkau oleh petani, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas petani dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani. Menurut Peraturan Menteri Pertanian No 1 Tahun 2020, harga pupuk urea bersubsidi adalah sebesar Rp90.000/50kg, pupuk SP36 bersubsidi sebesar Rp100.000/50Kg, pupuk NPK sebesar Rp115.000/50Kg, dan pupuk ZA sebesar Rp70.000/50Kg. Kebijakan subsidi pupuk telah membuat harga pupuk terjangkau bagi petani.

Setiap tahun secara nasional melalui Anggaran Pendapatan Dana Belanja Negara (APBN) ditampung besaran atau jumlah alokasi pupuk bersubsidi yang selanjutnya ditentukan kuota untuk masing-masing provinsi, dan di tindaklanjuti ke masing-masing Kabupaten/Kota, kemudian Kabupaten/kota akan menjabarkan kuota lebih lanjut ke masing-masing Kecamatan. Penyaluran pupuk bersubsidi harus berpedoman pada alokasi yang diberikan oleh pemerintah, pupuk bersubsidi tersebut harus diberikan kepada petani yang telah terdaftar di data RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok), dimana diawal tahun masing-masing petani didampingi oleh penyuluh menyusun kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun kedepan. Data RDKK ini diberikan ke kios atau pengecer pupuk bersubsidi ketika petani akan menebus pupuk bersubsidi.

Kebijakan subsidi pupuk yang masih berjalan hingga saat ini tentunya akan mencapai tujuannya dalam hal ini adanya peningkatan produktivitas dan pendapatan petani bila dalam pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Namun, hingga saat ini masih ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan ini seperti permasalahan harga, penyaluran, serta

pengawasan. Selain menyebabkan ketidakefektifan kebijakan pupuk bersubsidi, permasalahan tersebut juga menyebabkan adanya perbedaan alokasi dan realisasi pupuk yang disalurkan kepada petani seperti yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Hal ini menunjukkan bahwa pupuk yang di salurkan lebih besar dari pada jumlah alokasi. Permasalahan yang ada apakah penggunaan pupuk subsidi dapat meningkatkan produktivitas usahatani padi sawah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penggunaan pupuk subsidi terhadap peningkatan produktivitas hasil usahatani padi sawah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini berjudul “Analisis Komparasi Produktivitas Usahatani Padi Sawah di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur”. Oleh karena itu, responden dalam penelitian ini terdiri dari satu kelompok yaitu petani padi sawah menggunakan pupuk subsidi dan menggunakan pupuk non subsidi.

1.2 Rumusan Masalah

Usahatani padi sawah merupakan suatu usaha yang menghasilkan padi (beras) sebagai makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Usahatani padi sawah selain penting untuk menjaga produksi dan stock beras nasional juga penting bagi petani yang mengusahakannya karna terkait dengan pemasukan keluarga petani. Dengan berjalanya waktu harga output tidak stabil karna mahal nya harga input terutama pupuk. Dengan adanya program pemerintah yaitu subsidi pupuk di harapkan mampu menjaga tingkat produksi padi agar kebutuhan beras baik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pupuk bersubsidi dinyatakan sebagai barang yang diawasi peredarannya, pengawasan peredaran pupuk meliputi pengawasan terhadap jumlah, mutu, alokasi, wilayah, Harga Eceran Tertinggi atau yang biasa disingkat dengan HET dan sistem distribusinya. Subsidi bertujuan untuk melindungi petani dari dampak lonjakan harga pupuk, mendukung upaya peningkatan pendapatan usaha tani, mencegah penurunan penggunaan pupuk dan efisiensi pemupukan, mencegah penurunan kapasitas produksi pertanian rakyat, mendukung upaya pemantapan ketahanan pangan, mendukung terpeliharanya stabilitas sosial politik. Pada usahatani padi, pupuk merupakan sarana produksi yang penting. Namun

kebutuhan pupuk tersebut semakin meningkat dengan harga yang semakin tinggi juga. Akibatnya, penggunaan pupuk memerlukan biaya yang cukup besar merupakan beban bagi petani. Pemerintah merasa perlu mensubsidikan pupuk.

Dengan pemberian pupuk bersubsidi yang terbatas tersebut, diharapkan penggunaannya dapat dilakukan dengan efisien. Di samping itu, terdapat indikasi bahwa pemberian pupuk bersubsidi tersebut cenderung menyebabkan penggunaan yang berlebihan.

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran usahatani padi sawah di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Bagaimana produktivitas usahatani padi sawah menggunakan pupuk subsidi dan menggunakan pupuk non subsidi di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui gambaran usahatani padi sawah di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Menganalisis produktivitas usahatani padi sawah menggunakan pupuk subsidi dan menggunakan pupuk non subsidi di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada tingkat sarjana pada Fakultas Pertanian Universitas Jambi.
2. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak selanjutnya yang membutuhkan.
3. Sebagai salah satu referensi bagi penelitian berikutnya, baik di daerah yang sama maupun di daerah yang berbeda.
4. Sebagai informasi pemangku kebijakan dalam melakukan pengadaan, penyaluran, dan pengawasan pupuk bersubsidi.